



**DIMENSI DISPOSISI ATAU SIKAP PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN SISTEM KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DALAM
MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Oleh
Tyas Ari Handayani
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat
Email: hai_thea@yahoo.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dimensi Disposisi atau sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam mendukung system pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor. 95 tahun 2018. Menurut Van Meter & Van Horn (1977) bahwa ada 6 (enam) dimensi yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, yaitu : Tujuan Kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Karakteristik Organisasi dan Lingkungan social, politik dan ekonomi. Dari 6 (enam) dimensi tersebut akan di analisis dan dikaji dimensi Disposisi atau sikap pelaksana, seberapa besar efektivitas dan kontribusinya terhadap variabel Implementasi Kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan penilaian dokumen yang mendukung penelitian ini. Analisis dan pembahasan dilakukan terhadap unsur-unsur yang terdapat pada dimensi disposisi dan keterkaitannya dengan dimensi-dimensi lain sesuai konsep dan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil yang didapatkan adalah pertama : Disposisi atau sikap pelaksana menyumbang peran yang sangat besar terhadap efektivitas penerapan SRIKANDI, berdasarkan komentar seluruh narasumber Kunci. Kedua : Disposisi memegang peranan penting saat Implementasi Srikandi di terapkan di level bawah (staf) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketiga : Disposisi merupakan dimensi yang dapat mengikat secara mental dan moral semua pemangku kepentingan, dan Keempat : Disposisi sangat di tentukan oleh political will Kepala Daerah. Kesimpulan dai hasil penelitian ini terhadap dimensi disposisi : Dimensi Disposisi merupakan salah satu dari 6 (enam) dimensi menurut Van Meter Van Horn yang juga diterapkan oleh Teori Edward III, Charlen O Jones dan ahli-ahli lainnya

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Dan Disposisi

PENDAHULUAN

Permasalahan utama dalam Penerapan SRIKANDI diawali dari beberapa hal-hal teknis penyelenggaraan Kearsipan yang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lembaga, kementerian dan Pemerintahan Daerah. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam setiap penerapan Kebijakan. Kompetensi, kemampuan serta Sikap Mental SDM menjadi penentu efektivitas Penerapan SRIKANDI. Permasalahan inipun telah memicu penilaian

penyelenggaraan Kearsipan oleh ANRI yang sangat jauh hasilnya dari yang diharapkan. Sejalan dengan kondisi tersebut, desakan Pemerintah Pusat melalui ANRI untuk penerapan SRIKANDI disemua daerah tidak bisa di tawar-tawar lagi. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan yang dilakukan rutinitas setiap tahun oleh Arsip nasional Republik Indonesia (Anri) kepada seluruh lembaga, kementerian dan non kementerian serta Pemerintahan Daerah merupakan gambaran seberapa jauh Implementasi



Kebijakan Kearsipan menurut UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan turunannya terkait SRIKANDI dalam mendukung Perpres 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh ANRI kepada 634 instansi pemerintah di seluruh Indonesia (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN), bahwa penyelenggaraan kearsipan belum efektif dan optimal dilaksanakan sesuai UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dengan melihat fakta empirik diatas, penulis tertarik dan berminat untuk melakukan langkah pengkajian ilmiah dalam penelitian ini dengan Judul Dimensi Disposisi atau Sikap Pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berbagai referensi dan rujukan sangat diperlukan dalam penelitian ini terutama menyangkut penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintahan yang berbasis Online.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintahan sudah cukup banyak dilakukan dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda (Makmur, 2021). Penelitian-penelitian tersebut menyangkut kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, social politik, dan lain-lain. Hasil penelitian Rahadian (2007) menyimpulkan bahwa : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Kelompok Tani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan memberikan inspirasi dan minat yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan. Permasalahan utama penelitian Rahadian ini adalah pada Kemandirian kelompok tani yang rendah, rendahnya partisipasi kelompok tani, dan lain-lain. Menurut Rahadian, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diobati dengan

Implementasi Kebijakan dengan unsur-unsur utama : Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi. Penelitian yang relevan juga di lakukan Melleng (2007) yang menyimpulkan bahwa Pengorganisasian, Interpretasi dan Tindakan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Petani ternak. Penelitian Melleng ini pun menggunakan Pendekatan Kuantitatif. Berbeda dengan Rahadian, permasalahan utama pada penelitian Melleng ini adalah pada Pendapatan peternak yang rendah, berimbas pada menurunnya kesejahteraan peternak. Konsep dan teori yang digunakan Rahadian adalah konsep dan teori Edward III, sedangkan konsep dan teori yang digunakan oleh Melleng adalah konsep dan teori menurut Charles O. Jones. Menurut pandangan penulis, kedua penelitian diatas secara teoritik masih mengandung kelemahan-kelemahan, karena pendekatan kuantitatif hanya mengandalkan instrument kuisioner yang dijawab oleh responden. Sekalipun secara statistik kedua penelitian diatas dapat di generalisasi, namun kedalaman kebenaran tidak seperti dalam penelitian Kualitatif (Soewardi, 2003). Penelitian Kuantitatif dan penelitian Kualitatif masih menjadi perbincangan para ahli hingga saat ini, kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan permasalahan yang penulis hadapi dikancah penelitian, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini berangkat dari sebuah pemikiran, melihat fakta-fakta dilapangan bahwa pendekatan kualitatif akan lebih efektif karena menggunakan dan mengandalkan fakta-fakta empiris.

Penelitian terkait teknologi informasi dan komunikasi pun sudah cukup banyak dilakukan saat ini. Hasil penelitian Nurhayati (2022) menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelaporan berbasis Online memberikan dampak positif pada Kinerja Dinas Pertanian Jawa Barat. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian Nurhayati ini adalah konsep dan teori Charles O.Jones. Penelitian serupa



dilakukan Mubarak (2022) yang menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelatihan berbasis online berpengaruh terhadap Kinerja kelompok tani. Konsep dan teori yang digunakan Mubarak adalah konsep dan teori Edward III. Menurut hemat penulis, dari kedua hasil penelitian diatas dikaitkan dengan permasalahan utama dalam penelitian ini menyangkut Implementasi Kebijakan SRIKANDI yang belum berjalan, sumber daya yang rendah, dan sikap pelaksana atau disposisi dalam penerapan Kebijakan, factor lingkungan social dan politik dan lainnya, yang kesemuanya menjadi hambatan-hambatan utama dalam penerapan Implementasi Kebijakan SRIKANDI. Aplikasi ini sudah berjaalan di beberapa Kementerian dan Lembaga termasuk Pemerintahan Daerah. Namun beberpa kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi ini oleh Pemerintah Kota Waringin Barat terkait keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasara, sosialisasi dan komunikasi terkait SRIKANDI yang belum efektif, dan lain sebagainya. Secara factual kemajuan TIK saat ini memaksakan seluruh Pemerintahan Daerah harus menerapkan Elektronik Governance (E-Gov).

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi yaitu digunakan secara bertahap oleh lembaga negara dan/atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. SRIKANDI merupakan sarana bantu dalam bentuk aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan hingga penyusutan arsip secara digital dan terintegrasi. Pengelolaan arsip dinamis secara digital dan terintegrasi wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan

BUMN/BUMD menggunakan aplikasi SRIKANDI. SRIKANDI bersifat Government to Government(G2G) sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi Pusat dan Daerah. Penggunaan aplikasi SRIKANDI oleh organisasi-organisasi tersebut bermanfaat untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi serta memudahkan akses informasi kearsipan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi ini juga dapat meningkatkan kinerja aparatur sehingga lebih optimal dalam mencapai target organisasinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, SRIKANDI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang berlaku secara nasional. Penetapan ini bertujuan untuk mewujudkan layanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas dan terpercaya baik di Pusat maupun Daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik sehingga terwujud tata tekola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE bidang kearsipan dinamis. Penerapan kebijakan SRIKANDI merupakan wujud dukungan terhadap terselenggaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para narasumber Ahli, observasi terhadap keseluruhan proses Implementasi SRIKANDI dan penilaian terhadap dokumen yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode



.....
 kualitatif. Metode ini dilakukan pada kondisi objek alamiah yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggabungkan beberapa cara. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2011:8). Metode ini berusaha membedah suatu fenomena secara mendalam sehingga dapat mengembangkan konsep

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis dan membahas Dimensi Disposisi atau sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan SRIKANDI, penulis akan mengantar terlebih dahulu hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Rahadian (2007) dalam disertasi nya yang berjudul: Pengaruh Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Pertanian melalui Kemandirian Kelompok Tani memberikan kesimpulan bahwa seluruh dimensi Implementasi Kebijakan : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Kebijakan Pertanian yang bermuara pada Kemandirian Kelompok tani. Menurut Rahadian, yang menggunakan konsep dan teori Edward III bahwa dari 4 (empat) dimensi tersebut, dimensi DISPOSISI atau sikap pelaksana memberi sumbangan terbesar yaitu 23 %, sementara komunikasi 17 %, sumber daya 16,7 % dan Struktur birokrasi 18 %. Menurut Rahadian Sikap pelaksana yang menyangkut, semangat kerja, ketekunan, mental, harapan dan motivasi memegang peranan penting berhasil tidaknya sebuah Implementasi Kebijakan sehingga memberikan Pengaruh sebesar 23 %. Penelitian yang sama dilakukan Melleng (2007) dengan Judul disertasi:” Pengaruh Pengorganisasian, Interpretasi dan Tindakan terhadap Implementasi Kebijakan Peternakan dalam meningkatkan pendapatan Peternak. Melleng memberikan kesimpulan bahwa seluruh

.....
 dimensi: Pengorganisasian, Interpretasi dan Tindakan secara bersama-sama memberikan Pengaruh sebesar 82 %. Yang menarik dari hasil penelitian Melleng ini bahwa dimensi Interpretasi memberikan pengaruh cukup besar terhadap Implementasi Kebijakan Peternakan, yaitu sebesar 38 %. Secara teoretik, interpretasi menyangkut pikiran, sikap dan perilaku (Winardi, 2000), sehingga sikap memegang peranan penting dalam semua aktivitas. Hasil wawancara mendalam dengan 4 (empat) narasumber kunci terkait dimensi SIKAP dalam Implementasi Kebijakan SRIKANDI menunjukkan bahwa semua berkesimpulan yang sama bahwa “ dimensi disposisi atau sikap pelaksana amat menentukan dalam sebuah Kebijakan termasuk Implementasi Kebijakan SRIKANDI. Menurut Narasumber 1 (Bupati Kotawaringin Barat) :

Tanpa adanya sikap yang konsisten dan pandangan yang sama terhadap SRIKANDI, maka Implementasi Kebijakan tidak dapat berjalan sekalipun sudah di rencanakan dengan baik.

Dari pandangan yang dikemukakan Bupati Kotawaringin Barat memperjelas bahwa Sikap para ASN_PNS bahkan sikap masyarakat (Publik) sangat menentukan arah kebijakan yang akan di terapkan. Tanpa Sikap yang sama, seluruh proses kebijakan tidak akan terarah dengan baik. Narasumber 1 selanjutnya mengemukakan bahwa:

Semua Kebijakan pemerintahan dan negara sangat ditentukan oleh interpretasi publik atau interpretasi pelaksana dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Sikap pelaksana dan sikap masyarakat terhadap penerapan kebijakan harus sejalan dan searah.

Sejalan dengan pendapat narasumber 1, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku narasumber 2 mengemukakan bahwa:“ selaku bawahan Bupati, apapun yang menjadi perintah Bupati, maka seluruh staf dan bawahan harus memberikan SIKAP POSITIF yang berarti mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Daerah.



Menurut Narasumber 2 Sikap para pelaksana kebijakan sangat ditentukan oleh Pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Tanpa sikap yang jelas dan pasti, maka seluruh kebijakan tidak akan mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Implementasi Kebijakan SRIKANDI mengandalkan 2 (dua) sumber daya yaitu : sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya anggaran. Salah satu dari kedua sumber daya itu lemah, maka akan mempengaruhi seluruh sumber daya yang lain. Oleh karena itu Dimensi Disposisi atau sikap pelaksana merupakan kunci keberhasilan dari sebuah Implementasi Kebijakan. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Dari argumentasi yang dikemukakan Edward III, sangat jelas bahwa Sikap menyangkut kejujuran, komitmen dan Demokratis. Betapa besarnya makna teoritis SIKAP sehingga dalam demokrasi saja amat menentukan sebagaimana yang kita lihat saat ini tentang survei dan elektabilitas calon Presiden. Semua lembaga survei mengukur dan menilai SIKAP masyarakat. Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil Yang Diperoleh

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pertama : Disposisi atau sikap pelaksana menyumbang peran yang sangat besar terhadap efektivitas penerapan SRIKANDI sebagaimana hasil penelitian yang relevan dilakukan Rahadian (2007) dan Melleng (2007) , demikian pula berdasarkan komentar seluruh narasumber Kunci memberikan kesimpulan bahwa Disposisi atau sikap pelaksana memegang peranan kunci. Kedua : Disposisi memegang peranan penting saat Implementasi Srikandi di terapkan di level bawah (staf) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hal ini menjadi bukti bahwa di level staf bahkan level Publik dimensi disposisi atau sikap pelaksana yang berisikan : kejujuran, motivasi, harapan, integritas dan penafsiran adalah hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan, Ketiga : Disposisi merupakan dimensi yang dapat mengikat secara mental dan moral semua pemangku kepentingan, artinya semua lingkungan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan merasa terikat, peduli dan bertanggungjawab, dan Keempat : Disposisi sangat di tentukan oleh political will Kepala Daerah. Tanpa leadership (Kepemimpinan) Kepala Daerah yang kuat terhadap SRIKANDI, kebijakan ini hanya menjadi sebuah kebijakan yang berproses terus menerus tanpa output nya.

KESIMPULAN

1. Dari 5 (lima) dimensi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Van Horn : Tujuan Kebijakan, Komunikasi, Disposisi, Karakteristik Organisasi, dan Lingkungan ekonomi, social dan politik yang memberikan dan sangat menentukan dalam sebuah Implementasi Kebijakan adalah dimensi disposisi atau sikap pelaksana.
2. Disposisi atau sikap pelaksana mengandung unsur-unsur penting yang sangat dibutuhkan dalam kebijakan dan implementasi organisasi yaitu : integritas, motivasi, semangat, harapan dan kejujuran.



3. Disposisi merupakan dimensi yang dapat mengikat mental dan moral seluruh pemangku kepentingan .
4. Secara teoretik, Dimensi Disposisi merupakan dimensi yang cukup dominan pada konsep dan teori Edward III dan konsep dan teori Charles O. Jones

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik. AIPI Bandung
- [2] _____ (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
- [3] _____. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
- [4] Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- [5] Arsip Nasional Republik Indonesia (2021, 15 Maret), ANRI Gelar Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI bagi Pegawai di Lingkungan ANRI, diunduh 9 Desember 2022, dari situs <https://www.anri.go.id/publikasi/berita/anri-gelar-sosialisasi-aplikasi-srikandi-bagi-pegawai-di-lingkungan-anri>
- [6] Damayanti, K. (2019). Efektivitas penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dalam pengelolaan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
- [7] Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- [8] Fang, Z. (2002). E-government in digital era: concept, practice, and development. International journal of the Computer, the Internet and management, 10(2), 1-22
- [9] Gaffar, A. (2009). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [10] Haspo, L. N. A., & Frinaldi, A. (2020). Penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR dalam Manajemen Pengaduan Masyarakat di Kota Solok. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 26-33
- [11] Ibrahim, A., Arief, A., & Do Abdullah, S. (2020). Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. IJIS-Indonesian Journal On Information System, 5(2)
- [12] Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom
- [13] Jenkins, B. (ed.) (1997). Policy Analysis: Models and Approaches. The Policy Process: A Reader, second edition. New York: Taylor and Francis
- [14] Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. GOVERNANCE, 1(2)
- [15] Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020, 30 Juli). Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Siap Beroperasi pada 2023. Diunduh 25 Agustus 2022, dari situs World Wide Web: https://www.kominfo.go.id/content/detail/1/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan_media
- [16] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, 10 Oktober). Penerapan SPBE dan Rencana Pembangunan Pusat Data Nasional. Diunduh 8 September 2022, dari situs World Wide Web: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/penerapan-spbe-dan-rencana-pembangunan-pusat-data-nasional/>
- [17] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019,



- 25 April). Pengelolaan Arsip Jadi Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Diunduh 5 November 2022, dari situs World Wide Web: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pengelolaan-arsip-jadi-indikator-keberhasilan-reformasi-birokrasi>
- [18] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020, 28 Oktober). Aplikasi Srikandi, Lompatan Dalam Kearsipan SPBE. Diunduh 30 Oktober 2022, dari situs World Wide Web: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/aplikasi-srikandi-lompatan-dalam-kearsipan-spbe>
- [19] Makmur, Syarif (2021) “ Arsip dan Kearsipan : Tinjauan sosiologis dan Filosofis, Penerbit Grafindo Raja Persada, Jakarta
- [20] -----, (2021) “ Politik Lokal, sosiologi Pemerintahan dan Analisis Kebijakan, Penerbit Grafindo Raja persada, Jakarta
- [21] -----, (2023) Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis, Penerbit CV. Diva Pustaka, Purbalingga, Jawa tengah.
- [22] -----, (2023) Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Biroktasi Dalam Implementasi Kebijakan Kearsipan. Penerbit CV. Diva Pustaka, Purbalingga, Jawa Tengah
- [23] -----, 2023 Digitalisasi Arsip dalam mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik, Jurnal internasional terindeks covernicus-DOAJ, Academia Publisher, mei 2023
- [24] Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Social Research
- [25] -----, 2023 Paradigma baru Ilmu Kearsipan, Jurnal internasional terindeks Covernicus, Academia Publisher, mei 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Social Research
- [26] Mustopadidjaja, AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Administrasi Negara Kerjasama dengan Duta Pertiwi Foundation. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- [27] Melleng, Abdul Samad, (2007) Disertasi “ Pengaruh Implementasi kebijakan Peternakan terhadap Pendapatan Peternak di Kota Tangerang Banten. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- [28] Martini, H. M., & Nawawi, H. (1995). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- [29] Moleong, L. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- [30] ----- . (2009). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- [31] Mobarok, Zuroki (2022), Tesis “ Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelatihan berbasis online dan Kompetensi Widyaiswara terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kementerian Pertanian RI. Pasca sarjana Universitas Moestopo Beragama, Jakarta.
- [32] Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 109-116
- [33] Nugroho, R. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 213
- [34] Nurhayati (2022), Tesis “ Implementasi Kebijakan Pelaporan Online dan Efektivitas Pelaporan terhadap Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.



- Pasca sarjana Universitas Moestopo Beragama, Jakarta.
- [35] Pangerapan, T. M., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *GOVERNANCE*, 2(2)
- [36] Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- [37] Putra, F. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- [38] Rahmanto, A. N. (2020). Facebook sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Transportasi. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(1), 71-84
- [39] Rahadian, Achmad (2007), Disertasi “ Pengaruh Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Kemandirian kelompok tani. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- [40] Saintika, Y. (2018). Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan. *INISTA: Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications*, 1(1)
- [41] Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-Government dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 52-68
- [42] Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*
- [43] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- [44] _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Indonesia: Alfabeta
- [45] Sumardiyono, B. (2019). Analisis Persyaratan Fungsional Aplikasi SIKD Berdasarkan ISO 16175-2: 2011. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 8(2), 94-101
- [46] Sumarno, S., & Suliyati, T. (2021). Budaya Peduli Arsip dalam Pengelolaan Arsip Digital Berbasis Web: Studi Kasus pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 5(1), 56-65.
- [47] Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- [48] _____. (2019). *Materi Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka
- [49] Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset
- [50] Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Bandar Lampung: Suluh Media
- [51] Udoji, C.J. (1981). *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association for public Administration and Management
- [52] Van Meter, D.S & Van Horn, C.E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration And Society*. February
- [53] Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- [54] Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo
- [55] _____. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- [56] Widodo. (1974). *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi. Universitas Gadjah Mada. Yulia, E. 2001



- [57] _____. (2010). Implementasi kebijakan. Yogyakarta: Andi Offset
- [58] _____. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media
- [59] Wiryanto, W., & Afif, M. M. (2017). Akuntabilitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 63-77
- [60] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- [61] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [62] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- [63] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- [64] Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis
- [65] Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
- [66] Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik
- [67] Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
- [68] Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
- [69] Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip
- [70] Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
- [71] Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip